

BAB III

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN DATA

Pada bab tiga ini akan dikemukakan mengenai penyajian data dan analisis data. Data-data yang tersaji berupa hasil dari penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Di dalam bab tiga ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Sleman dan Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dalam mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah tahun 2017-2018.

Hasil yang ada di dalam penelitian ini berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian strategi komunikasi, sedangkan studi dokumentasi berupa foto-foto permasalahan sampah dan kegiatan yang berkaitan dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Sleman dalam mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.

A. SAJIAN DATA

1.1. Analisis Situasi Persampahan di Kabupaten Sleman

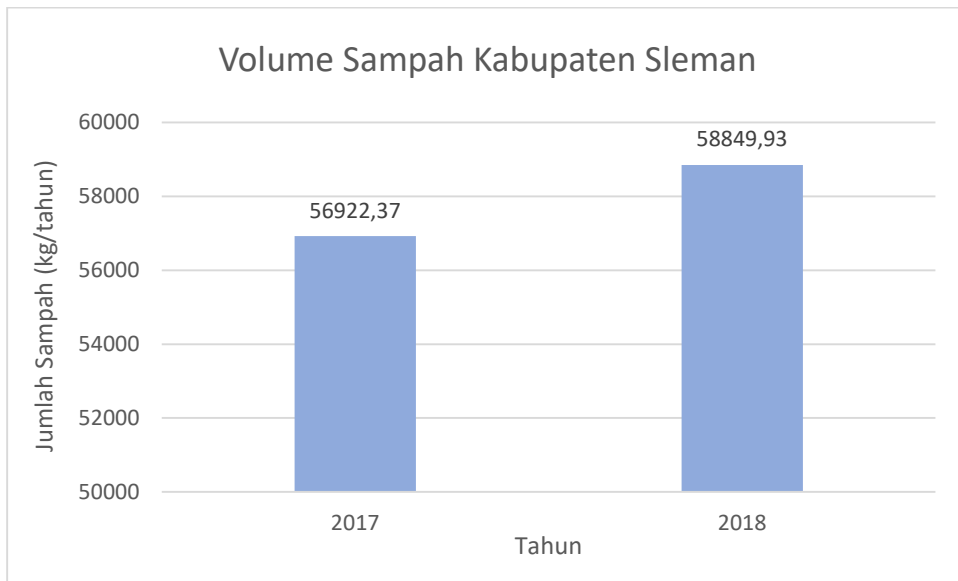
Semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur juga tidak terlepas dari penambahan jumlah penduduk yang dapat menimbulkan masalah. Hal ini terjadi di Kabupaten Sleman dimana terjadi pertumbuhan infrastruktur dan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi akan berpengaruh terhadap produksi volume sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman merupakan pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan suatu tindakan preventif atau edukasi kepada masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi adalah dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman adalah menyampaikan bahwa ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah serta sanksi yang akan diberikan jika masyarakat dan pihak-pihak tertentu tidak mengindahkan perintah dan larangan dari regulasi tersebut. Bentuk upaya lain yang juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah adalah dengan membuat program-program seperti membentuk Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, Bank Sampah, dan TPS3R.

Situasi volume sampah di Kabupaten Sleman selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada (Gambar 3.1), selain dari itu pada tahun 2018 belasan timbunan sampah liar masih ditemukan di beberapa lokasi di Kabupaten Sleman. Melihat situasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman memiliki tantangan yang cukup besar kedepannya dalam melakukan pengelolaan sampah, namun tentu saja tantangan tersebut bisa diatasi dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Beberapa hambatan yang dialami oleh DLH Sleman dalam melakukan pengelolaan sampah adalah masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, selain dari itu terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman juga menjadi penyebab terbatasnya jumlah sosialisasi yang dilakukan sehingga untuk lebih meningkatkan jumlah sosialisasi di beberapa lokasi setiap tahunnya belum bisa terealisasi. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Suryantono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman, berikut ini.

“Kadang itu kita ambil contohnya ya dievakuasi sampah sudah dibersihkan itu besoknya ada lagi. Kita kan perlu dukungan dari masyarakat ya. Sampah liar itu kan mungkin ditepi jalan itu kalo semuanya yang menangani Dinas Lingkungan Hidup kita kan enggak mampu mbak karena tenaga kita kan terbatas dan SDM kita juga terbatas. Nah, makanya itu strategi kita minta masyarakat itu berpartisipasi secara aktif ikut menjaga lingkungannya, supaya lingkungannya juga ikut bersih.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).



Gambar 3.1 Peningkatan Volume Sampah di Kabupaten Sleman

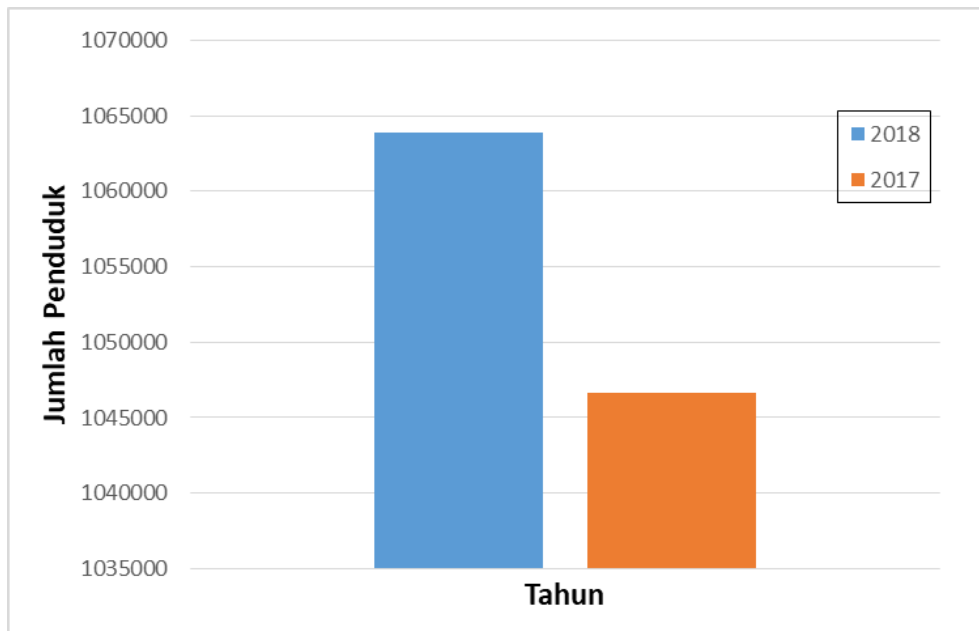
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman



Gambar 3.2 Timbunan Sampah Liar di Kabupaten Sleman

Sumber : <https://www.starjogja.com>

Permasalahan sampah memang menjadi masalah pokok di setiap daerah, agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sampah maka inti permasalahan perlu dirumuskan agar permasalahan yang akan diselesaikan memiliki batasan yang jelas. Inti masalah persampahan di Kabupaten Sleman adalah pertumbuhan populasi penduduk dan pertumbuhan infrastruktur yang selalu meningkat setiap tahunnya, namun realitas yang terjadi dilapangan kesadaran setiap individu masyarakat dalam mengelola sampah tidak berbanding lurus dengan jumlah populasi yang ada. Jumlah pertumbuhan penduduk dari 2017 sampai 2018 dapat dilihat pada (Gambar 3.3) di bawah ini.



Gambar 3.3 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman

Sumber : kependudukan.jogjapro.go.id

1.2. Perencanaan Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dalam Mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah yang dimaksud dalam Perda adalah sebagai berikut:

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaaur ulang sampah;
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Penanganan sampah yang dimaksud dalam Perda adalah sebagai berikut:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan;
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Dari 3 kategori pengurangan sampah yang ada di Perda, hampir secara keseluruhan sudah pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dimulai dari kategori pembatasan timbulan sampah, dalam pengurangan titik timbulan sampah, DLH Sleman telah melakukan upaya dengan memasang Papan Informasi Larangan yang disertai dengan sanksi yang akan diberikan pada pihak yang melanggar. Kemudian pada kategori daur ulang dan pemanfaatan

kembali sampah dilakukan DLH dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hasil dari sosialisasi daur ulang sampah di beberapa lokasi di Kabupaten Sleman sudah ada yang berjalan, sebagai contoh daur ulang sampah di Kecamatan Turi yang sudah menghasilkan berbagai produk. Dokumentasi produk dapat dilihat dilampiran.

Kategori penanganan sampah pada Perda terbagi menjadi 5 bagian, pertama kategori pemilahan sampah yang dilakukan dengan membuat program Bank Sampah dan TPS3R. Kemudian kategori pengumpulan dilakukan dengan menyediakan titik-titik TPS diberbagai lokasi. Selanjutnya kategori pengangkutan dilakukan dengan menyediakan sarana-sarana pengangkutan baik dari pemukiman ke TPS atau dari TPS ke TPA. Kategori pengolahan dan pemrosesan akhir di tempatkan di TPA Piyungan, Bantul.

Meskipun diatas dijelaskan program-program yang merupakan implementasi dari Perda, tetapi pada penelitian ini pembahasannya lebih difokuskan pada Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dalam mensosialisasikan Perda Pengelolaan Sampah secara umum, bukan terfokus pada detail program-program yang dijalankan.

Langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dalam merencanakan kegiatan sosialisasi Perda adalah sebagai berikut:

1. Analisis Data

Dalam analisis data yang dimaksudkan ini yaitu riset mengenai target sasaran sosialisasi yang akan dituju nantinya. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dilakukan berdasarkan atas dua hal, yang pertama merupakan kegiatan program tahunan yang dilakukan oleh DLH Sleman dan kedua berdasarkan permintaan dari masyarakat atau pihak lain seperti pelaku usaha. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bapak Suryantono berikut ini.

“Sosialisasi yang kami lakukan juga bisa berdasarkan atas permintaan, nah permintaan itu bisa langsung dari masyarakat atau permintaan juga bisa dari desa atau dari kecamatan ataupun juga ada program dari kecamatan yang mendanai diusulkan ke kabupaten daerah nah itu biasanya minta narasumber dari kami.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

2. Menentukan Komunikator

Komunikator atau Publik kunci merupakan orang yang disegmentasikan sebagai narasumber atau publik yang dapat mendukung dan bekerjasama dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat demi mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penentuan narasumber atau publik kunci yang akan membantu dalam mensosialisasikan Perda tentang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman

menentukan dengan cara melihat narasumber atau publik yang memiliki ketertarikan, motivasi tinggi, dan berpengalaman dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Persampahan DLH Kabupaten Sleman dalam wawancara dengan pernyataan sebagai berikut.

“Dalam melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, penentuan narasumber adalah mereka yang sudah berpengalaman dilapangan, memiliki ketertarikan dan motivasi tinggi serta dapat membagi ilmunya kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

Pihak yang biasa dijadikan narasumber atau publik kunci oleh DLH Sleman adalah orang-orang yang memiliki pengalaman di lapangan seperti, masyarakat yang bergerak aktif dalam pengelolaan Sampah Mandiri, aktif pada TPS3R dan aktif di pengelolaan Bank Sampah. Alasan DLH Kabupaten Sleman menganggap mereka layak dijadikan sebagai publik kunci adalah karena merekalah yang selama ini menjalani dan merasakan bagaimana realita yang sesungguhnya terjadi dilapangan, dan mereka juga yang mengetahui bagaimana penyampaian atau bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

“Selain dari Dinas Lingkungan Hidup kita kan juga ada narasumber dari luar yang memang sudah memiliki pengalaman dilapangan, dari pelaku langsung kan mereka menggunakan bahasa mereka kalo kita dinas sifatnya teknis dan kebijakan tapi yang untuk umumnya ini ya dari pelaku langsung itu kita jadikan sebagai narasumber, caranya mengelola sampah itu seperti apa mereka pakai bahasa mereka yang mudah. Nah, dari situ diharapkan masyarakat dapat memahami dengan baik mbak.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, *“Setiap warga diwajibkan untuk mengurangi sampah dan mengelola sampah dengan baik”*. Implementasi dari Perda di atas adalah membuat salah satu program Kelompok Pengelolaan Sampah Mandiri (KPSM) yang dapat mengurangi dan menangani sampah. Dalam proses penelitian, penulis mencoba untuk melakukan wawancara dengan salah satu narasumber atau publik kunci yang selama ini dianggap sukses dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dalam melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui program KPSM.

Ibu Ani Sumiarti sering diundang menjadi narasumber dalam beberapa sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak DLH Sleman. Ibu Ani Sumiarti merupakan salah satu publik kunci yang aktif di Kelompok Pengelolaan Sampah Mandiri (KPSM) Kasturi, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. KPSM Kasturi merupakan salah satu kelompok pengelolaan sampah yang dikenal sukses di Kabupaten Sleman. Berbagai prestasi telah banyak diraih dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga tingkat Nasional. Dengan berbagai prestasi yang diraih tersebut DLH Sleman melibatkan ibu Ani Sumiarti dalam program pengelolaan sampah diberbagai lokasi di Kabupaten Sleman seperti diundang sebagai pembicara beberapa program yang diselenggarakan DLH Sleman, juga sebagai juri dalam kegiatan Kalpataru di Kabupaten Sleman. Dokumentasi sebagai pembicara dalam sosialisasi pengelolaan sampah dan undangan permohonan Juri di Kalpataru cabang Kabupaten Sleman, dapat dilihat pada lampiran.

Ibu Ani Sumiarti merupakan ibu rumah tangga yang memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dengan cara yang menarik, unik dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dengan semangat tinggi tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman merangkul Ibu Ani Sumiarti untuk ikut aktif membantu melakukan edukasi pengelolaan sampah.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Ani Sumiarti untuk mengetahui apa sebenarnya yang melatarbelakangi beliau memiliki semangat tinggi dalam melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, berikut pernyataan beliau.

“Sebenarnya itu saya suka jadi saya tu pengen tau gimana sih sampah itu harus kita kelola, saya tidak hanya mau kalo sampah itu dikelola dalam arti gini saya berpihak kepada masyarakat kecil yang tidak tau apa-apa. ya gini masyarakat itu kan umumnya di Indonesia itu kalo suruh keluar uang kan enggak mau, bener ndak? Maunya gratis kan nah saya cari bagaimana masyarakat tau tentang pengelolaan sampah tapi tidak terlalu banyak mengeluarkan uang dan itu yang ingin saya kemas gitu loh.” (Wawancara dengan Ibu Ani Sumiarti Sekretaris Pengelola Sampah Mandiri Kasturi, 6 Juli 2019).

Cara Ibu Ani Sumiarti dalam melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat sangatlah unik, beliau membuat sebuah edukasi untuk anak-anak dengan konsep permainan, Ibu Ani membuat kartu-kartu mainan atau yang disebut Kuartet yang di dalamnya berisi informasi sampah-sampah yang dapat dikelola, sehingga secara tidak langsung anak-anak akan terbiasa mengenali jenis-jenis sampah yang bisa dikelola kembali.

Selain dari itu untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang jenis-jenis sampah yang bisa dikelola kembali Ibu Ani membuat poster yang berisikan gambar-gambar sampah. Dengan informasi secara visual, dengan cara-cara seperti itu diharapkan masyarakat lebih mudah untuk memahami pesan yang disampaikan.



Gambar 3.4 Kartu Kuartet tentang sampah
 Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 3.5 Kartu Kuartet tentang sampah
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 3.6 Brosur Pemilahan Sampah di Kasturi

Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 3.7 Pamflet Pemilahan Sampah di Kasturi

Sumber : Dokumentasi Pribadi

3. Menentukan Tujuan

Tujuan didefinisikan sebagai suatu hasil yang diharapkan atau diinginkan untuk dapat memecahkan masalah yang ada yang dilaksanakan dengan menggunakan peluang maupun memenuhi tantangan. Tujuan dibuat dan dilakukannya sosialisasi perda adalah untuk mengatur semua elemen masyarakat agar bisa lebih baik dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, dengan demikian akan terciptalah lingkungan yang bersih dan sehat. Tujuan pengelolaan sampah juga tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 yang berbunyi:

“Pengelolaan sampah bertujuan untuk: mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan; meningkatkan kualitas lingkungan; meningkatkan kesehatan masyarakat; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” (Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015).

Berdasarkan hasil wawancara, tujuan dilakukan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 menurut bapak Suryatana adalah sebagai berikut:

“Tujuannya supaya masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, karena sumber sampah itu kan juga dari masyarakat kan, masyarakat di lingkungan perkantoran, diperdagangan nah itu kan mereka juga bagian dari masyarakat juga. Tujuan Perda itu kan agar sampah itu terkelola dengan baik dan sesuai dengan aturan, artinya sampah juga bisa tertangani dan terkelola. Intinya pengelolaan sampah itu pengurangan sampah dan penanganan sampah ya mbak. Sampah bisa berkurang seminimal mungkin, sampah juga terkelola dengan sebaik mungkin, syukur sampah dapat terkelola sampai 0 lah bisa habis terkelola mbak. Jangan sampai ada sampah yang keluar, itu harapan kami. Kan selama ini masih belum ya mbak, masih banyak yang dibuang ke TPA Piyungan padahal kan TPA sekarang sudah *overload* itu kalo kita melihat TPA sudah ngeri. Apa lagi Sleman itu tidak punya TPA, nah TPA kita itu Sleman, Kota, Bantul itu kan jadi satu. Kalo di Bantul sudah tidak menerima, kita harus buang kemana? Iya kan. Masak mau dibuang ke sungai? Kita memang sudah saatnya alih teknologi lah, baik ke TPA maupun ke Sleman juga.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

4. Menentukan Khalayak

Komunikasi atau penerima pesan itu merupakan khalayak baik individu maupun kelompok yang akan dijadikan sasaran dalam kegiatan komunikasi. Yang dijadikan target atau sasaran dalam mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2015 ditujukan kepada semua elemen masyarakat, siswa-siswi dari SD, SMP, SMA dan dari pihak-pihak atau pelaku usaha seperti mall, hotel, dan lain sebagainya yang perlu diberikan pembinaan tentang pengelolaan sampah dengan baik. Dari beberapa objek sasaran tersebut masyarakat merupakan objek prioritas DLH Sleman dalam melakukan sosialisasi pengelolaan sampah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bapak Suryantono berikut ini.

“Target sasarannya lebih kita tekankan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pengelolaan sampah karena sumber sampah itu kan juga dari masyarakat, masyarakat itu ya betul-betul di masyarakat, masyarakat di lingkungan perkantoran, perdagangan nah itu kan juga mereka.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

5. Menentukan Lokasi

Penentuan lokasi sangat penting dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, kesiapan lokasi akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan sosialisasi. Penentuan lokasi pelaksanaan sosialisasi oleh DLH Sleman disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat. Lokasi-lokasi sosialisasi yang pernah dilaksanakan oleh DLH Sleman yaitu di fasilitas publik yang terdapat di desa seperti di Balai RW, di Rumah Pak Dukuh, dan lain sebagainya. Selain kepada masyarakat DLH Sleman juga pernah melaksanakan sosialisasi di

tempat pelaku usaha. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Suryantono berikut ini.

“Banyak sekali kalau lokasi sosialisasi, sebenarnya kalo sosialisasi itu kemarin di Kecamatan Depok itu diminta di rumah makan gitu, kemudian di desa-desa banyak juga langsung ke kelompok-kelompok itu. Narasumbernya itu bisa dari dinas atau dari dinas ambil narasumber dari luar juga bisa dari kelompok-kelompok yang memang sudah biasa menjalani nanti kita pakai sebagai narasumber. Kalau hotel untuk tahun ini kita belum, tapi tahun-tahun kemarin kita pernah di daerah Kaliurang waktu itu disosialisasi itu kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata, itu mengadakan sosialisasi terhadap hotel-hotel tentang pengelolaan sampah di hotel itu seperti apa lalu maunya pemerintah seperti apa nah itu semua kita sosialisasikan.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

6. Menentukan Strategi Komunikasi

Strategi merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada narasumber publik kunci melalui saluran spesifik dengan tujuan untuk memotivasi suatu tindakan. Upaya pengelolaan sampah DLH Sleman melakukan dengan kegiatan berupa pembinaan dan pelatihan. Sosialisasi merupakan bagian dari program pembinaan DLH Sleman, DLH Sleman melakukan sosialisasi secara langsung dan secara struktural, sosialisasi secara langsung merupakan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang ada di desa atau dusun, sedangkan sosialisasi secara struktural atau berjenjang dilakukan bertahap dan dimulai dari tingkat Kecamatan- Desa- Dusun.

Sosialisasi yang dilakukan kepada Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) juga termasuk sosialisasi secara langsung. Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DLH Sleman yaitu melakukan presentasi kemudian disertai dengan memberikan materi-materi yang sudah di cetak kepada masyarakat maupun publik kunci. Selain dari itu DLH Sleman juga aktif melakukan sosialisasi melalui beberapa media dan kelompok-kelompok tertentu. Kegiatan sosialisasi juga bisa dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat, pernyataan tersebut disampaikan Bapak Suryantono berikut ini.

“Kalau sosialisasinya kita lakukan secara langsung maupun secara struktural, kalo langsung kita langsung ke masyarakat itu langsung ke desa atau dusun kalo secara berjangka, secara struktur itu melalui kecamatan, melalui desa, lalu nanti ke dusun. Tapi kalo langsung ke kelompok-kelompok pengelolaan sampah yang calon-calon kelompok pengelolaan sampah itu secara langsung. Itu dasarnya bisa permintaan, nah permintaan itu bisa langsung dari masyarakat atau permintaan juga bisa dari desa atau dari kecamatan ataupun juga ada program dari kecamatan yang mendanai diusulkan ke kabupaten daerah nah itu biasanya minta narasumber dari kami.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

Beberapa pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah berdasarkan permintaan sudah cukup banyak dilakukan oleh DLH Sleman, berikut pernyataan Bapak Suryantono:

“Belum lama ini kami telah melakukan sosialisasi di Kecamatan Depok, kami melakukan sosialisasi di salah satu rumah makan, selain dari itu kami juga melakukan sosialisasi di beberapa desa dengan narasumber bisa dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari kelompok-kelompok yang biasa dijadikan narasumber.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Desa atau Dusun, DLH Sleman juga aktif melakukan sosialisasi ke beberapa hotel dan tempat usaha yang ada di Kabupaten Sleman yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata. Selain dari itu DLH Sleman juga pernah melakukan sosialisasi kepada beberapa sekolah di Sleman.

7. Menentukan Media Pendukung

Setiap strategi kegiatan yang telah ditentukan harus didukung dengan ketersediaan alat komunikasi, alat komunikasi yang dimaksud bisa berupa sosial media, media cetak dan lain sebagainya yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun alat-alat atau media yang digunakan oleh DLH Sleman dalam melakukan mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus melakukan pembinaan yaitu brosur, papan informasi, pamflet, buku panduan, layanan *website* yang difungsikan sebagai layanan pengaduan masyarakat Kabupaten Sleman, dan sekali-sekali memanfaatkan media penyiaran TV & Radio. Berikut merupakan pernyataan dari bapak Suryantono terkait media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi.

“Media yang digunakan untuk sosialisasi itu ada Slide Power Point presentasi sama dibagikan kayak selebaran gitu atau brosur kalo buku ada tapi terbatas Perda nya ada dibagian belakang. Kita juga pernah menggunakan media melalui TV itu pernah TVRI Jogja dalam acara Angkringan pernah saya ikut sekali dan di TV yang jalan Wonosari itu AdiTV juga saya pernah. Dan kalau untuk radio itu saya pernah juga. Temen-temen dari MMTC juga pernah wawancara ke saya. Lewat media sosial itu ada di Lapor Sleman, DLH ada didalam situ. Langsung dengan Pemda. Jadi ada istilah Lapor Sleman itu adalah keluhan-keluhan masyarakat se-Sleman itu bisa lewat sana, nantikan Dinas

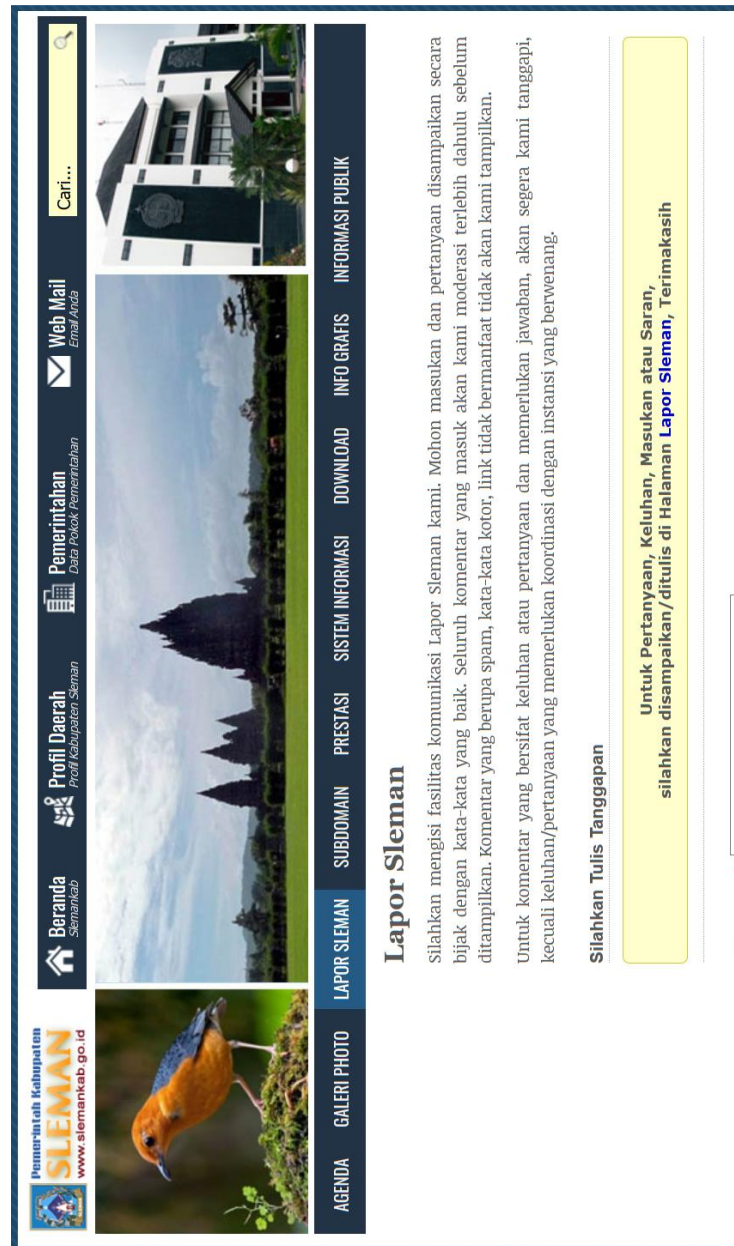
Lingkungan Hidup akan menindak lanjuti.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

Penggunaan media seperti *website* Lapor Sleman merupakan sebuah solusi yang dianggap cukup efektif dalam melakukan tindakan cepat terhadap permasalahan sampah, masyarakat bisa menyampaikan secara langsung keluhannya ke pemerintah daerah tanpa melalui perantara pihak-pihak tertentu yang akan membutuhkan waktu yang lebih lama. ketersediaan layanan tersebut disambut baik oleh masyarakat, hal itu di tandai dengan adanya beberapa laporan permasalahan sampah dari masyarakat yang disampaikan lewat website tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Suryantono berikut ini.

“Sejauh ini partisipasi masyarakat yang melapor ya ada mbak, kita disini berusaha sesuai dengan kemampuan kami yang ada, apapun itu yang untuk berkaitan dengan masalah lingkungan ya ada sampah liar, penebangan liar, ada pembuangan sampah tidak pada tempatnya dan ada yang bakar sampah itu semua kita tindaklanjuti kita koordinasikanlah. Sampai ada yang bakar sampah, nimbun sampah sampai bau dan ada masyarakat yang komplain kan ada yang enggak berani terus lapor ke kami ya ada itu, sehingga perlu ditutup ya kita koordinasikan pernah seperti itu juga. Perda Nomor 4 Tahun 2015 itu kan didalamnya memuat ada larangan dan ada sanksinya juga, dipasal 49 itu larangan dan sanksinya dipasal 64 gitu. Dan ada fisiknya juga dilapangan, papan larangan itu ada di daerah Godean.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).



Gambar 3.8 Papan Informasi Pelanggaran Pembuangan Sampah Liar
Sumber : <http://images.solopos.com>



Gambar 3.9 Website Layanan Pengaduan Kabupaten Sleman
 Sumber : <http://www.slemankab.go.id>



Gambar 3.10 Sosialisasi Pengelolaan Sampah
Sumber : <https://krjogja.com>

8. Menentukan Waktu Pelaksanaan

Penentuan waktu pelaksanaan sangat penting digunakan dalam merancang suatu program terutama di pemerintahan, dengan ditetapkannya waktu pelaksanaan, berjalan baik atau tidak suatu kegiatan akan mudah dikontrol. Waktu pelaksanaan sosialisasi di DLH Sleman biasanya dibuat di akhir tahun, Jadwal yang dibuat tersebut merupakan jadwal untuk satu tahun kedepannya. Meskipun DLH Sleman setiap awal tahun sudah merencanakan jadwal dan lokasi kegiatan-kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan. Hanya saja jadwal yang dibuat bisa saja berubah karena waktu pelaksanaan kegiatan tersebut menyesuaikan dengan kesiapan dari masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Suryantono berikut ini.

“Menentukan waktu itu tidak ada bakunya, itu kan tergantung kesepakatan saja. Masyarakat minta terus kita koordinasikan kapan ada waktu. Mungkin kan masyarakat ada pertemuan RT atau RW pertemuan Dusun nah mau di gabungkan atau tidak nanti dicari celahnya mana paling pas kapan gitu jam berapa, dimana kita komunikasikan dan ada juga kita diluar jam kantor tidak masalah kadang sabtu atau minggu ya kita tidak masalah, kita sebagai pelayan masyarakat harus siap mbak.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

9. Ketersediaan Anggaran

Jumlah kebutuhan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional sebuah program dari perencanaan awal sampai dengan selesai, di pemerintahan penentuan anggaran harus disesuaikan dengan alokasi dana yang disetujui. Anggaran DLH Sleman berasal dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah atau disingkat dengan APBD, dan anggaran yang

disediakan setiap tahunnya merupakan anggaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara, pak Suryantono mengatakan bahwa jumlah anggaran yang disediakan saat ini sudah dianggap cukup untuk melakukan sosialisasi di beberapa lokasi di Kabupaten Sleman meskipun sebenarnya masih banyak lokasi-lokasi yang perlu dilakukan sosialisasi. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) di DLH Sleman menjadi salah satu faktor penyebab masih banyaknya lokasi-lokasi yang belum mendapat sosialisasi, meskipun jika anggaran sosialisasi tahunan diberikan lebih banyak tetapi karena keterbatasan SDM yang dimiliki tentu saja kegiatan tersebut tidak akan bisa terealisasi dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bapak Suryantono sebagai berikut:

“Anggaran untuk sosialisasi saya rasa sudah cukup ya tetapi kalau mau menambah kita tenaganya juga terbatas jadi kita terus terang kurang SDM, nah sebenarnya kita juga ingin lebih banyak sosialisasi di mana-mana karena kita sosialisasinya masih kurang banyak. Tapi tenaga kita terbatas enggak banyak narasumbernya dari dinas, dan nanti kalo dilepas dari luar semua narasumbernya kita enggak yakin juga, kan harus ada juga dari dinas yang mendampingi. Jadi yang jelas masih kekurangan SDM di Persampahan itu. Mungkin tidak hanya di Persampahan ya mungkin di dinas mana-mana juga sama karena masalahnya di Pemda itu semuanya kurang SDM karena banyak yang purna tapi tidak ada yang menggantikan.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

10. Merumuskan Kriteria Keberhasilan

Kriteria Keberhasilan merupakan suatu standar yang dirumuskan untuk dapat mengukur seberapa sukses sasaran berhasil diraih melalui program. Berdasarkan hasil wawancara, Sejauh ini DLH Sleman belum

menetapkan standar baku terkait kriteria kesuksesan sosialisasi, selama ini DLH Sleman mengukur tingkat kesuksesan pelaksanaan sosialisasi hanya berdasarkan penilaian secara visual atau apa yang dilihat dilapangan saja dan biasanya hanya berdasarkan penilaian dari beberapa titik lokasi saja tidak secara keseluruhan sedangkan untuk penilaian berdasarkan data-data yang valid yang memuat seluruh titik lokasi di kabupaten Sleman belum pernah dilakukan. Hal Berikut ini merupakan pernyataan kriteria kesuksesan pelaksanaan sosialisasi menurut Bapak Suryantana.

“Pengelolaan sampah yang bagus itu ya yang sudah dapat menyelesaikan permasalahan sampah disekitar lingkungannya dan dapat mengakomodir mengkondisikan dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan juga bisa merangkul kelompok-kelompok pengelolaan sampah disekitarnya seperti TPS3R bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok pengelolaan sampah disekitarnya. Nah sehingga lingkungannya disatu Desa tersebut bersih dan sampah tertangani dengan baik.” (Wawancara dengan Bapak Suryantana Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

Apakah hasil dari sosialisasi yang dilakukan selama ini sudah memenuhi kriteria yang disampaikan di atas. Berikut jawabannya.

“Memenuhi kriteria sampai 100% belum ada karena memang susah ya, mungkin baru sekitar 60% atau 70% lah tapi sudah mendingan, masyarakat sudah mau berbuat dan mau melaksanakan pengelolaan sampah itu sudah bagus minimal sudah lumayan mengurangi sampah ya walaupun menanganinya masih kurang maksimal, dari pada sampah tidak dikelola sama sekali ya setidaknya saat ini sudah ada pengurangan sampah dan penanganan sampah.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

11. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program yang nantinya hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Sejauh ini DLH Sleman belum melakukan evaluasi secara resmi terhadap kegiatan sosialisasi yang telah mereka lakukan, alasannya adalah karena saat ini DLH Sleman masih fokus pada program pembinaan masyarakat.

Kegiatan Evaluasi bisa saja dilakukan, hanya saja karena terbatasnya jumlah SDM yang ada di DLH Sleman membuat kegiatan tersebut belum dapat dilakukan. Terkadang ketersediaan anggaran tahunan juga menjadi faktor penyebab belum dilaksanakannya program evaluasi. DLH Sleman mengatakan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan pembinaan terlebih dahulu, setelah itu nanti akan ditindak lanjuti dengan kegiatan evaluasi. Sehingga sampai saat ini DLH Sleman belum bisa mengukur tingkat keberhasilan mereka dalam mensosialisasikan Perda karena tidak adanya data data survey yang bisa disajikan. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan:

“Kita untuk melakukan evaluasi membutuhkan anggaran yang besar jadi kita hanya fokus pada pembinaan saja. Kalau untuk evaluasi harus ada survey seberapa jauh dan lain sebagainya. Sehingga untuk saat ini kita belum punya data-data yang evaluasi, artinya ya itu kita sifatnya masih pembinaan dan secara umum dilihat dulu sampah disini menggunung sekarang sudah berkurang sudah ada kemajuan, misalnya dulu sering buang sampah ke kebun sekarang sudah berkurang, tapi itu yang paling bisa kita lihat keadaan secara kasat mata seperti itu, tetapi kalo untuk angka-angka tertulis gitu belum ada.” (Wawancara dengan Bapak Suryantono Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, 13 Mei 2019).

B. PEMBAHASAN

Setelah melakukan penyajian data pada pembahasan sebelumnya, pada bagian ini peneliti akan membahas dengan cara analisis data penelitian. Jika sebelumnya peneliti hanya memaparkan data-data yang sudah diperoleh dan didapatkan di lapangan baik berupa data wawancara maupun data dokumentasi, maka pada bagian ini peneliti akan menganalisis data-data yang telah peneliti dapatkan tersebut dengan menggunakan teori yang telah penulis paparkan sebelumnya di bab satu.

Strategi komunikasi merupakan suatu panduan dari sebuah perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan juga manajemen (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi sangatlah diperlukan, khususnya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak, terutama dalam lembaga pemerintahan yang merupakan lembaga pelayanan publik. Strategi komunikasi yang efektif selalu diawali dengan sebuah perencanaan, hal ini karena perencanaan yang matang merupakan kunci keberhasilan dari suatu kegiatan.

Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya membuat volume sampah di Kabupaten Sleman semakin meningkat. Meningkatnya volume sampah dapat menimbulkan berbagai masalah. Seperti yang dijelaskan pada sajian data bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman masih dihadapkan dengan adanya beberapa timbunan sampah liar di beberapa lokasi.

Sebagai instansi pemerintahan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Sleman tentu saja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman harus mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Effendy (1984) menjelaskan bahwa proses komunikasi secara primer merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahas, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Salah satu upaya yang dilakukan DLH Sleman dalam mengurangi masalah sampah adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan bagian dari proses komunikasi secara primer.

Menurut Laurie J. Wilson (2008) strategi komunikasi dikelompokkan menjadi 4 yaitu, “*Research*”, “*Action Planning*”, “*Communication*”, dan “*Evaluation*”. Berdasarkan 4 kategori strategi komunikasi di atas kemudian jika dihubungkan dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. *Research*

a. Latar Belakang

Dilatar belakangi oleh masih banyak permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Sleman, sebagai instansi pemerintahan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman harus mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sosialisasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH Sleman merupakan sebuah bentuk respon yang diberikan terhadap permasalahan sampah yang terjadi. Bentuk kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh DLH Sleman adalah mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah serta menyampaikan adanya sanksi yang akan diberikan jika masyarakat dan pihak-pihak tertentu tidak mengindahkan perintah dan larangan dari regulasi tersebut.

Upaya sosialisasi Perda yang dilakukan oleh DLH Sleman sudah cukup baik dalam merespon permasalahan sampah, dengan disampaikannya Perda pengelolaan sampah diharapkan masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengelolaan sampah kemudian juga dengan disampaikan adanya sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar akan membuat masyarakat menjadi takut untuk membuang sampah sembarangan.

b. Analisis Situasi

Berdasarkan data yang diperoleh, volume sampah di Kabupaten Sleman selalu meningkat setiap tahunnya, selain dari itu timbunan sampah liar juga masih banyak yang ditemukan, tentu saja ini menjadi tantangan cukup besar yang harus diatasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi Perda dan program pengelolaan sampah harus lebih banyak lagi dilakukan. Tetapi situasi yang terjadi saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman belum bisa untuk meningkatkan jumlah sosialisasi mereka, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Seharusnya DLH Sleman bisa lebih menambah SDM mereka untuk meningkatkan jumlah sosialisasi Perda dan kegiatan-kegiatan program pengelolaan sampah lainnya, tetapi untuk menambah SDM tersebut tentu saja membutuhkan biaya operasional lebih banyak lagi. Untuk menambah biaya operasional, DLH Sleman tidak bisa memutuskan secara sepihak tetapi juga harus menyesuaikan dengan ketersediaan dana dari APBD setiap tahunnya.

c. Inti Masalah

Agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sampah maka inti permasalahan perlu dirumuskan agar permasalahan yang akan diselesaikan memiliki batasan yang jelas. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menyatakan bahwa inti dari permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Sleman adalah karena pertumbuhan penduduk yang terus

meningkat, pertumbuhan infrastruktur seperti pusat perbelanjaan, hotel dan lainnya yang juga terus berkembang pesat. Hal yang sangat disayangkan adalah pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, sehingga sampah yang dihasilkan tidak terkelola dengan baik.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa jika hanya mengandalkan pemerintah saja dalam mengelola sampah, maka pemerintah tidak akan mampu, ditambah lagi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki DLH Sleman juga terbatas dan dapat dikatakan kekurangan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu DLH Sleman saat ini masih berfokus pada pembinaan masyarakat, dengan begitu diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dapat meningkat.

d. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat bahwa ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah, selain dari itu juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan tepat, dengan begitu permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Sleman dapat berkurang dan dapat teratasi dengan baik. Dalam Perda juga disebutkan bahwa tujuan dilakukannya sosialisasi adalah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat disemua kawasan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan,

meningkatkan kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Penentuan sasaran dari sebuah kegiatan sangatlah penting, tanpa adanya hal tersebut sebuah kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Dan begitu juga DLH Sleman, dalam melakukan sosialisasi Perda mereka harus menentukan sasaran target terlebih dahulu. Adapun sasaran DLH Sleman dalam melakukan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 ditujukan kepada semua elemen masyarakat dan pihak-pihak swasta lainnya agar mampu memahami pesan yang terkandung dalam perda tersebut, sehingga akan membuka pikiran mereka untuk lebih aktif dalam pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan dan menghindari pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

2. *Action Planning*

a. Penentuan Publik Kunci

Menurut Laurie J. Wilson (2008) Publik kunci merupakan orang yang disegmentasikan sebagai publik yang dapat mendukung dan bekerjasama dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat demi mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Pemilihan publik kunci yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman selama ini sudah cukup baik, mereka mencari pelaku atau orang-orang yang memiliki ketertarikan, motivasi dan pengalaman dalam pengelolaan sampah. Pihak yang biasa dijadikan publik kunci oleh DLH Sleman adalah pelaku atau orang-orang yang memang sudah terbukti benar memiliki pengalaman di lapangan seperti,

masyarakat yang bergerak aktif dalam pengelolaan sampah mandiri, aktif pada TPS3R dan aktif di pengelolaan bank sampah. Alasan DLH Sleman menganggap mereka layak dijadikan sebagai publik kunci adalah karena merekalah yang selama ini menjalani dan merasakan bagaimana realita yang sesungguhnya terjadi dilapangan.

Penentuan kriteria publik kunci yang di jelaskan diatas sudah cukup baik, tetapi untuk kasus dalam mensosialisasikan Perda terkadang publik kunci juga kurang memahami isi dari Perda tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ibu Ani Sumiarti bahwa publik kunci atau pelaku yang ditentukan oleh DLH Sleman, lebih cocok untuk melakukan sosialisasi edukasi kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi Perda mereka sendiri terkadang belum begitu memahami isi Perda tersebut, dan mereka juga cukup kesulitan untuk menyampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Karena bahasa-bahasa yang digunakan dalam Perda tersebut lebih mengarah ke bahasa akademisi.

b. Strategi dan Taktik

Strategi merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada publik kunci melalui saluran spesifik dengan tujuan untuk memotivasi suatu tindakan (Laurie J. Wilson, 2008). Strategi komunikasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman ini dalam mensosialisasikan Perda adalah pengelolaan sampah dibagi menjadi dua yaitu secara langsung dan secara struktural. Strategi secara langsung yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh DLH Sleman dengan cara terjun langsung ke

lapangan kepada masyarakat di Pedukuhan atau Desa tanpa melalui perantara Kecamatan dan lain sebagainya. Sosialisasi tipe ini merupakan sosialisasi yang sudah menjadi tugas wajib DLH Sleman untuk melakukannya, biasanya waktu dan tempat kegiatan sudah di jadwalkan di awal tahun kegiatan.

Kemudian sosialisasi struktural merupakan sosialisasi yang dilakukan secara terstruktur atau berjenjang. Maksud dari terstruktur disini adalah sosialisasi yang dilakukan kepada pihak perantara dari yang umum ke khusus dalam hal ini bisa dari pihak Kecamatan ke pihak Desa, dari pihak Desa ke pihak Pedukuhan, atau bahkan melalui publik kunci ke pada masyarakat. Semua perantara-perantara tersebut nantinya akan disampaikan kepada masyarakat dengan cara dan bahasa mereka sendiri. Menurut DLH Sleman terkadang cara seperti ini dinilai kurang efektif karena pihak yang dijadikan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat terkadang juga kurang begitu memahami isi dari pesan yang ingin disampaikan dan juga kurang pandai menyampaikan dalam bahasa yang sederhana, sehingga isi pesan yang akan diterima masyarakat juga kurang baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut DLH Sleman telah memberikan alternatif lain yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat permintaan sosialisasi ke lokasi mereka masing-masing, DLH Sleman kemudian akan merespon dengan cepat permintaan yang diajukan serta siap memfasilitasi apa-apa saja yang nantinya akan dibutuhkan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Taktik merupakan alat komunikasi yang harus dipenuhi untuk dapat mendukung setiap strategi. Menurut Effendy (1984) Proses komunikasi secara sekunder adalah penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Alat-alat yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman selama ini dalam sosialisasi baik sosialisasi Perda maupun sosialisasi kegiatan-kegiatan lainnya dinilai sudah cukup bagus. Penggunaan media fisik berupa brosur, papan informasi larangan, pamflet dan buku panduan akan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya penggunaan media-media fisik tersebut akan memudahkan DLH Sleman dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Selain dari itu penggunaan media fisik yang dijelaskan di atas juga akan lebih memudahkan masyarakat dalam memahami isi pesan yang disampaikan. Karena media yang berwujud akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat daripada hanya menyampaikan secara lisan.

Selain memanfaatkan media yang berwujud, dalam menanggulangi masalah persampahan DLH Sleman juga memanfaatkan media lain seperti *website*, Pemerintah Kabupaten Sleman membuat sebuah *website* yang difungsikan sebagai media laporan masyarakat terhadap semua permasalahan yang ada di Kabupaten Sleman, termasuk masalah persampahan. Setiap masyarakat disarankan untuk menyampaikan laporannya atau keluhan-keluhan yang ada disekitar lingkungan mereka kepada pemerintah jika

melihat masalah sampah yang belum ditangani dengan baik, nantinya DLH Sleman akan menindak lanjuti secara capat.

Selain memanfaatkan *website* sebagai media lapor, DLH Sleman juga memanfaatkan media penyiaran seperti Radio dan Televisi. DLH Sleman pernah melakukan sosialisasi di media televisi TVRI terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Pihak DLH Sleman menyatakan bahwa baru sekali melakukan sosialisasi di media televisi, padahal media televisi memiliki kelebihan dan dapat menjangkau target publik yang lebih luas dan lebih cepat jika dibandingkan dengan media-media lainnya. Seharusnya sosialisasi melalui media seperti ini bisa lebih diperbanyak lagi agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima di masyarakat luas. Kendala yang dialami jika ingin menggunakan media ini adalah tingginya biaya yang dibutuhkan, sehingga DLH Sleman terkadang untuk menjangkau target publik yang lebih luas menggunakan media penyiaran radio yang biayanya lebih rendah dari media Televisi, dan itu merupakan sebuah tindakan yang dianggap cukup efektif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Perkembangan media sosial saat ini sudah semakin pesat mengingat saat ini peran teknologi sudah tidak dapat dilepaskan dari setiap kehidupan manusia. Berdasarkan hasil survei dari *we are social* 2019 yang dikutip dari *brilio.net* menyatakan bahwa media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indoensia adalah *YouTube*, tercatat 88% orang Indonesia menggunakan *YouTube*. Kemudian penggunaan sosial media peringkat kedua

di Indonesia adalah *WhatsApp*, sebanyak 83% masyarakat Indonesia menggunakan sosial media ini. Kemudian yang ketiga diisi oleh *Facebook*, sebanyak 81% orang Indonesia masih aktif menggunakan *Facebook*.

Berdasarkan dari data survei seharusnya DLH Sleman bisa memanfaatkan *trend* dari sosial media tersebut untuk melakukan sosialisasi yang lebih efektif serta tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Edukasi-edukasi pengelolaan sampah seharusnya dapat disajikan dalam bentuk video kemudian diupload di *YouTube* kemudian disebar luaskan kepada masyarakat bisa melalui pihak tingkat Kecamatan, tingkat Desa, bahkan tingkat Kabupaten yang lebih mudah dan cepat dipahami oleh masyarakat. Kemudian untuk sosial media lainnya juga dilakukan dengan hal yang sama.

c. Kalender

Penggunaan kalender pelaksanaan sangat penting digunakan dalam merancang suatu program terutama di instansi Pemerintahan, dengan ditetapkannya waktu pelaksanaan, berjalan baik atau tidak suatu kegiatan akan mudah dikontrol. Kalender pelaksanaan untuk setiap kegiatan selama ini telah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman, kalender pelaksanaan disajikan kedalam sebuah tabel yang berisi tentang jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, target realisasi fisik, dan target realisasi anggaran.

Meskipun sudah dibuat demikian, realita yang terjadi selama ini pelaksanaan untuk setiap kegiatan terkadang meleset dari jadwal yang telah ditentukan, terutama untuk jadwal pelaksanaan sosialisasi, karena dalam melakukan sosialisasi Perda maupun sosialisasi pengelolaan sampah, DLH Sleman harus menyesuaikan dengan kesiapan waktu dari masyarakat bahkan tidak menutup kemungkinan sosialisasi dilaksanakan pada malam hari. Dengan berubahnya jadwal tersebut tentu saja target-target yang telah ditetapkan pada waktu awal perencanaan akan meleset.

d. Anggaran

Anggaran merupakan langkah awal yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan suatu kegiatan, tanpa mempertimbangkan ketersediaan anggaran maka dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan akan berisiko terjadi hambatan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa mereka menyadari sosialisasi yang dilakukan selama ini dianggap masih kurang banyak, jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama ini menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran tahunan dari APBD yang telah disetujui. Tetapi jika mereka mengajukan penambahan jumlah anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi, mereka juga memiliki kendala karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM), sehingga penambahan jumlah sosialisasi yang cukup signifikan belum bisa dilakukan oleh DLH Sleman saat ini.

Permasalahan diatas tentu tidak akan bisa diatasi jika hanya memberikan satu solusi, maksudnya jumlah sosialisasi tidak akan bisa ditingkatkan jika hanya menambah anggaran saja atau hanya menambah jumlah sumber daya manusia (SDM) saja, tetapi antara anggaran dan SDM harus ditambah secara bersamaan dengan begitu jumlah kegiatan sosialisasi akan bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi DLH Sleman sebaiknya mengajukan penambahan SDM dan penambahan anggaran secara bersamaan kepada pemerintah Kabupaten Sleman.

3. *Communication*

a. Tabel Konfirmasi Komunikasi

Laurie J. Wilson (2008) menjelaskan bahwa Tabel konfirmasi komunikasi digunakan untuk memastikan kesiapan seluruh rencana yang dapat dilihat dalam satu lembar berbentuk tabel. Dalam tabel dibuat kolom yang berisikan rekapitulasi keseluruhan rencana dari mulai publik kunci, pesan yang akan disampaikan, pihak yang berpengaruh, sasaran, strategi hingga taktik yang digunakan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman sudah memiliki tabel konfirmasi untuk sosialisasi Perda hanya saja informasi yang disajikan belum begitu lengkap seperti yang dijelaskan di atas. Tabel konfirmasi komunikasi di DLH Sleman hanya menyajikan waktu kegiatan dan lokasi kegiatan sedangkan untuk publik kunci, sasaran, dan strategi tidak disajikan dalam tabel. DLH Sleman sebaiknya melengkapi tabel konfirmasi mereka dengan sasaran dan strategi agar kegiatan yang akan mereka laksanakan dapat

berjalan dengan baik dan apabila suatu ketika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan, tabel konfirmasi komunikasi tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memastikan apakah kegiatan yang telah mereka lakukan sudah tepat sasaran.

4. *Evaluation*

a. Kriteria

Kriteria merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah program. Sejauh ini DLH Sleman belum memiliki kriteria yang resmi dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan program sosialisasi sampah. Kriteria yang digunakan oleh DLH Sleman selama ini dalam mengukur tingkat kesuksesan pelaksanaan sosialisasi hanya berdasarkan tingkat kehadiran peserta dan penilaian secara kasat mata pada lokasi yang telah dilakukan sosialisasi, sedangkan penilaian berdasarkan data-data yang valid dan dengan analisis statistik belum pernah dilakukan.

Sebaiknya DLH Sleman menetapkan terlebih dahulu kriteria-kriterian kesuksesan sebuah program sebelum program tersebut dilaksanakan. Adanya ketetapan kriteria-kriteria pada suatu program akan membuat program tersebut dapat berjalan lebih terarah. Semakin banyaknya indikator yang dijadikan tolak ukur untuk mengukur kesuksesan sebuah program maka tingkat keberhasilannya juga akan lebih tinggi.

b. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program yang nantinya hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman belum bisa melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Berdasarkan pernyataan dari Kasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman yang menyebutkan bahwa saat ini DLH Sleman masih fokus pada program pembinaan sedangkan untuk program evaluasi sejauh ini belum bisa dilaksanakan. Sehingga sampai saat ini untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan sosialisasi Perda yang telah dilakukan, belum bisa diketahui berdasarkan data-data yang akurat.

Program evaluasi dalam sebuah instansi sangatlah penting, untuk mengetahui apa saja kesulitan dan hambatan yang dialami pada proses pelaksanaan dalam sebuah program tentunya perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Faktor penyebab belum dilaksanakannya kegiatan evaluasi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman terkendala oleh terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan anggaran. DLH Sleman sampai saat ini belum bisa untuk melaksanakan kegiatan evaluasi karena terbatasnya SDM yang akan melaksanakan, jika dipaksakan kegiatan tersebut untuk tetap berjalan, maka hasil yang akan diperoleh tidak akan baik dan pegawai di DLH Sleman juga akan kewalahan untuk

menyelesaikan semua kegiatan tersebut. Selain dari itu anggaran yang disediakan selama ini juga masih terfokus untuk program pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat jadi jika ditambahkan kegiatan evaluasi, anggaran yang tersedia tidak akan mencukupi untuk membiayai dua kegiatan sekaligus. Solusi untuk memecahkan masalah tersebut tentu saja harus menambahkan jumlah SDM dan anggaran secara bersamaan, dengan begitu kegiatan evaluasi akan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik.